

## Manajemen Angka Kemiskinan Ekstrem Terhadap Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat

**Andi Tenri Mantikaisih Laras**  
Universitas Sangga Buana YPKP  
Email: : [dinaskesehatankii@gmail.com](mailto:dinaskesehatankii@gmail.com)

**Dety Mulyanti**  
Universitas Sangga Buana YPKP  
Email: [dmdetym@gmail.com](mailto:dmdetym@gmail.com)

Alamat: Jl. PHH Mustofa No.41 Bandung, Jawa Barat.

**Abstract:** *The goal of this study was to examine the government's role in addressing severe poverty and lowering stunting rates in the Dompu Regency of West Nusa Tenggara. Poverty and stunting are two major global challenges that affect all countries, including Indonesia. There are various causative elements, including economic and food factors. Children from low-income families are more likely to suffer from stunting due to their inability to meet nutritional needs, as do moms throughout adolescence and pregnancy. As a result, the POAC Management technique is adopted, which stands for Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. The data was acquired using reduction analytic techniques, data display, verification, and qualitative descriptive analysis. The study was carried out in Dompu Regency to ensure its relevance.*

**Keywords:** *Poverty Management, Stunting*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam menangani angka kemiskinan ekstrem terhadap penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Terdapat dua masalah yaitu kemiskinan dan stunting yang mana ini merupakan isu penting dunia termaksud Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab yaitu faktor ekonomi dan faktor pangan. Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, begitu pula dengan ibu saat remaja maupun masa kehamilan. Dengan demikian digunakan pendekatan Manajemen POAC *Planning, Organizing, Actuating*, serta *Controlling*. Data-data dikumpulkan melalui teknik menganalisis reduksi, penyajian data, verifikasi dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Dompu sehingga relevan terhadap pelaksanaan konvergensi kebijakan pencegahan stunting. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya prevalensi tinggi nya angka kemiskinan ekstrem terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Dompu, pemerintah telah melakukan upaya dan melaksanakan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Manajemen Kemiskinan, Stunting

## **PENDAHULUAN**

Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai dengan standar deviasi Z score  $< -2$  sampai dengan  $-3$  SD (pendek/ stunted) dan  $< -3$  SD (sangat pendek / severely stunted) menurut WHO. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat akumulasi ketidak cukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (catch up growth) yang memadai. Hal ini harus diwaspadai Karena akan mempengaruhi masa depan generasi bangsa.

Penyebab stunting bukan hanya karena factor pangan tetapi juga faktor ekonomi, dimana diketahui kemiskinan sangat erat kaitan nya dengan stunting. Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih beresiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi begitu pula dengan ibu saat remaja maupun masa kehamilan. Adapun angka kemiskinan di Indonesia menurut bps tercatat Tingkat kemiskinan September 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%).

Pemerintah dalam hal ini memberikan perhatian khusus, sebagaimana yang disampaikan oleh presiden Presiden RI Joko Widodo mengatakan dalam sebuah forum bahwa stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis. Untuk itu presiden mengatakan bahwa semua sektor harus terlibat dalam menurunkan angka stunting ini, yaitu capaian sebesar 14% pada tahun 2024 sebagaimana Standard WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20%.

Pemerintah dalam lingkup lebih khusus yaitu kabupaten Dompu yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data rilis terakhir BPS, Angka Kemiskinan Kabupaten Dompu berada di peringkat 3 Kab/Kota se NTB atau berada di urutan pertama diantara Kabupaten se NTB. Sedangkan kondisi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Dompu Tahun 2022 tercatat sejumlah 7.842 Jiwa atau 2,97% dari total populasi. Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 mengalami kenaikan 3% dari SSGI Tahun 2021.

Sejalan dengan upaya penurunan stunting Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 55 Tahun 2020 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting, dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2021. Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting. Upaya penurunan prevelensi stunting penting dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip manajemen karena dapat membantu menurunkan angka stunting melalui kerja sama lintas sektor melalui startegi dan sarana prasarana di Kabupaten Dompu. Maka peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai “Manajemen Tingginya angka kemiskinan dalam Upaya Penurnan Angka Stunting di Wilayah Kabupaten Dompu”, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tinggi nya angka kemiskinan terhadap penurunan angka stunting melalui penerapan prinsip manajemen di wilayah Kabupaten Dompu.

## **LANDASAN TEORI**

### **Manajemen**

Manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (KBBI), Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan orang-orang dan menggerakkan fasilitas-fasilitas dalam suatu usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu (The Liang Gie) manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Budi Supriyanto). Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam bentuk pelayanan public.

Fungsi Manajemen menurut POAC yaitu (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*) merupakan Siklus manajemen yang dilakukan oleh perusahaan dengan merencanakan, mengorganisasi staf dan sumber daya yang ada, melaksanakan program kerja, dan mengendalikan jalannya pekerjaan. *Planning* merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan melalui dua acara yaitu apa yang akan dilakukan perusahaan dan membuat *budget* (anggaran). *Organizing* adalah suatu kegiatan pembagian tugas kepada setiap sumber daya yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya. *Actuating* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk

bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Tahapan ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi. *Controlling* mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan dan melakukan koreksi-koreksi apabila aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis kualitatif deskriptif (Sugiyono 2022), berikut terlampir tabel desain penelitian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Desain Penelitian**

NO	Desain	Uraian
1	Pendekatan Penelitian	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2	Fokus Penelitian	Penerapan prinsip manajemen dalam upaya menganalisis hubungan tinggi nya angka kemiskinan terhadap penurunan angka stunting
3	Aspek Penelitian	Alat ukur yang digunakan dalam penelitian adalah POAC ( <i>Planning, Organizing, Actuating dan Controlling</i> )).
4	Tempat Penelitian	Wilayah kerja kabupaten Dompu
5	Teknik Pengumpulan Data	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
6	Teknik Pemilihan Informan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu Masyarakat.
7	Teknik Analisa Data	Penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

**Tabel 2. Prevalensi stunting di Kabupaten Dompu**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Data</b>
1	2020	29,19%
2	2021	18,72%
3	2022	14,3%

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dompu, 2022

Hal ini sejalan dengan tujuan capaian penurunan angka stunting yang dicanangkan Kementerian Kesehatan RI. Prevalensinya sudah di bawah batas toleransi stunting WHO sebesar 20%. Telah mencapai target dengan lebih rendah dari target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 18,45.

### **Pembahasan**

Pencapaian penurunan angka stunting ini berhasil dicapai dengan melakukan kerja sama pada semua lintas sector yang terkait dan dijalankan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun mulai dari sector inti yaitu puskesmas melalui berbagai macam program dan intervensi khusus, khusus nya pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah agar tujuan penurunan stunting tercapai. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dalam membantu tercapainya tujuan ini adalah dengan melakukan pendekatan manajemen dengan menggunakan prinsip **POAC Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pengarahan), serta Controlling (pengendalian)**.

#### ***Planning***

Atau perencanaan adalah kegiatan yang menentukan sasaran yang hendak dicapai, dan memikirkan cara serta penentuan penggunaan sarana dalam pencapaian sarana tersebut. Alokasi sumberdaya yang amat terbatas, merupakan prinsip dan landasan dasar dalam merumuskan perencanaan dan pengorganisasian (George R. Terry dalam Sukarna, 2011: 10). Maka diperlukan kebijakan dari pemerintah sebagai solusi dalam menganalisis hal tersebut. Suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi

telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut (DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si, 2014).

Dalam upaya menurunkan pravelensi Stunting khusus nya di Kabupaten Dompu sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pusat, adapun prosedur yang akan dilakukan sebagai berikut :

SURVEI	
Angka Stunting	Angka Kemiskinan Ekstrem
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1. Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 mengalami kenaikan 3% dari SSGI Tahun 2021, berbanding terbalik dengan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) mengalami penurunan 1,3% dari tahun 2022</li> <li>✓ Jumlah sampel (balita terukur) pada SSGI tahun 2022 sebanyak 630 balita (3%) dari total balita di Kabupaten Dompu dengan sampel 241 usia 0-23 bulan (38%) dan 389 usia 24-59 bulan (62%)</li> <li>✓ Balita terukur pada e-PPGBM adalah seluruh total balita di Kabupaten Dompu sebanyak 20.878 balita (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berdasarkan rilis data terakhir dari BPS, pada tahun 2021, Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu adalah sebesar 12,60% atau <math>\pm</math> 30,471 jiwa dari 241.836 jiwa atau meningkat 0,44% dari tahun sebelumnya yaitu 12,16 %</li> <li>✓ Berdasarkan rilis data terakhir dari BPS, pada tahun 2022 Angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 12,40% dari tahun sebelumnya sebesar 12,60% artinya terjadinya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,20% dari tahun sebelumnya. Angka Kemiskinan Kabupaten Dompu berada di peringkat 3 Kab/Kota se NTB atau berada di urutan pertama diantara Kabupaten se NTB.</li> </ul>

(Sumber : Paparan Bupati Dompu 2022)

### **Organizing (pengorganisasian)**

Adalah merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi. Fungsi-fungsi ini membentuk suatu hubungan dalam sistem, di mana bagian yang satu menunjang bagian yang lain dan lini yang satu bergantung pada lini yang lain. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan kegiatan menjalin hubungan antar semua aktivitas kerja, penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatan semua sumberdaya, melalui struktur formal dengan kewenangan masing-masing.

1. Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya komitmen lintas sektor dalam penurunan stunting baik dalam aspek data (cakupan layanan) maupun anggaran</li><li>2. Kurangnya Rencana Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dgn Lintas sektor Yang dilakukan terutama di tingkat Kecamatan dan Desa</li><li>3. Keterbatasan jumlah Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) dan Pendistribusian TPG Yang tidak merata</li><li>4. Dukungan sarana prasarana yg masih kurang, baik di tingkat Puskesmas maupun Posyandu. Dari 10 Puskesmas hanya 6 PKM yang memiliki USG dan dari 443 Posyandu hanya 73 Posyandu yang memiliki antropometri.</li><li>5. Kapasitas dan Insentif Kader Posyandu Yang Belum Memadai</li><li>6. Alokasi APBDes masih belum dapat maksimal dalam intervensi Percepatan Penurunan Stunting</li><li>7. Kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang belum memadai sehingga akses menjadi sulit</li><li>8. Belum adanya juknis monev sehingga masih terdapat format pelaporan yang tidak seragam antara ketersediaan data di web system dan format pelaporan dari kementerian.</li></ol>
2. Intervensi Spesifik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MOU dengan Dikpora dan Dikmen baru tersedia pada Desember 2022 sehingga menyebabkan rendahnya konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri di sekolah</li><li>2. 60% Persalinan dilakukan secara SC sehingga banyak bayi yang tidak mendapatkan IMD dan ASI eksklusif</li><li>3. Hb Meter di Puskesmas banyak yang rusak. Hb Meter dan BMHP untuk skrining Anemia baru diterima pada bulan Februari 2023 sehingga cakupan Remaja putri dan ibu hamil yang diperiksa anemia rendah</li><li>4. Rendahnya Anak usia 6-23 bulan yang</li></ol>

	<p>mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)</p> <p>5. Rendahnya Keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</p>
3. Intervensi Sensitif	<p>1. Banyak balita stunting yang tidak memiliki NIK Beberapa program yg membutuhkan NIK sebagai dasar Intervensi susah dilakukan (BPJS dan PKH)</p> <p>2. Cakupan KB Akses pelayanan ke daerah terpencil sulit, sarpras yang terbatas dan kurang memadai, rendahnya minat calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan KB pasca salin</p> <p>3. Edukasi Gizi Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM yang melakukan Edukasi Gizi</p> <p>4. Bantuan Sosial Sasaran penerima manfaat belum menyasar Keluarga stunting dan berisiko stunting</p> <p>5. Balita stunting sebagian besar dari keluarga sosial ekonomi rendah.</p>

### ***Actuating atau Penggerakan***

*Actuating* merupakan kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumberdaya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran. Dalam penggerakan (*actuating*) dilakukan penyatuan semua kegiatan dan penciptaan kerjasama dari seluruh lini, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lancar dan efisien. Dalam Hal ini pemerintah kabupaten Dompu mengarahkan focus pada Isu atau permasalahan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai tujuan bersama yang ingin dicapai, adapun hal tersebut disajikan dalam table dibawah ini :



Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE)	
1.	Pandemi covid 19 berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat terutama pada keluarga miskin
2.	Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan dasar terutama kebutuhan penyediaan layanan Pendidikan dan Kesehatan
3.	Terbatasnya akses masyarakat miskin dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan keterampilan serta lapangan kerja untuk menunjang penghidupan secara layak dan berkelanjutan
4.	Masih ditemukan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum padan dengan data di Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)
5.	Data P3KE yang di rilis tidak komprehensif menggambarkan rumah tangga kategori kemiskinan ekstrem sesuai dengan standar garis kemiskinan (fakta lapangan masih ada rumah tangga miskin ekstrem yang belum masuk pada data P3KE)
6.	Basis data kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya terintegrasi kedalam program dan kegiatan lintas sektor
7.	Minimnya kolaborasi dan masih tingginya ego sektoral sehingga program pengentasan kemiskinan belum maksimal menjangkau target yang tepat

### **Controlling atau Pengawasan**

*Controlling* merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan agar para anggota organisasi dapat bekerjasama dengan baik, dan pergerakan yang sama ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, guna menghindari penyimpangan penyimpangan, dan jika diperlukan segera melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi. Dalam hal ini pemerintah kabupaten dompu memiliki harapan berupa penyampaian usulan pada pemerintah pusat, sebagai berikut:

usulan pada pemerintah pusat	
<p><b>1. TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)</b></p>	<p>a) Pemenuhan Fasilitas Stunting (USG sebanyak 4 unit Dan Antropometri Kit sebanyak 380 unit)</p> <p>b) Pengangkatan CPNS Tenaga Kesehatan terutama ahli gizi</p> <p>c) Dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting (sumber dana : DAK Non Fisik/BOK)</p> <p>d) Support Dana Kelanjutan Program Tim Percepatan Penurunan Stunting</p> <p>e) Dukungan anggaran kepastian keberlanjutan program-program kebijakan penurunan stunting.</p>
<p><b>2. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)</b></p>	<p>a) Peningkatan kapasitas TKPKD dalam menyusun kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem yang lebih inklusif</p> <p>b) Penambahan menu DAK Fisik mendukung tematik Kemiskinan Ekstrem</p> <p>c) Penambahan bantuan pengurangan beban pengeluaran (Bantuan sosial reguler), seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Bantuan sosial</p>

	<p>khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler.</p> <p>d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan bagi pekerja dan calon pekerja melalui balai Latihan kerja.</p> <p>e) Pendampingan, Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.</p> <p>f) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi/air minum layak dan peningkatan rumah tidak layak huni.</p>
--	---

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagaimana mengacu pada visi presiden adalah dengan menurunkan angka stunting hingga 2024 mendatang, maka terkhusus nya Kabupaten Dompu juga telah melakukan berbagai macam upaya melalui kerja sama lintas sektor, melalui program yang telah dibuat dan dijalankan sejauh ini serta intervensi khusus terkait masyarakat dengan kondisi ekonomi miskin extreme. Angka penurunan stunting menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten Dompu dalam

menanganai hal ini dengan serius. Akhir kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten Dompu berhasil dalam menyukseskan penurunan angka stunting ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius L.L Kobun, Albertus Magnus Susilo. Internasional Journal of Economics, business and Management. (2022) : Stunting Poverty and Nutrition Status (Case Study at Tetaf Health Center, Timor Tengah Selatan Regency East Nusa Tenggara Province. <http://dx.doi.org/10.51505/ijeblr.2022.6301>
- A.Kustanto. Journal of Development Economics (2021). The Prevalance Of Stunting, Poverty, and Econommic Growth in Indonesia : A Dynamic Panel Data Causality Analysis. <https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.22358>
- B. Hidayat, Putri Erlyn. (2021) : Stunting and Poverty Management Strategies in the Palembang City, Indonesia. <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i2.218>
- Dwi Darma Puspita Sari, Sukanto, Taufiq Marwa, Abdul Bashir. (2020). The Causality between economic growth, poverty, and stunting : Empirical evidence from Indonesia. <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i1.8834>
- Kemiskinan, Badan Ousat Statistik Kabupaten Dompu (2023) dari <https://dompukab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>
- Mengenal Apa itu Stunting (2022). Diakses pada 11 April 2023 dari [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting)
- Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen (2022) Diakses 12 April 2023 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4% (2023). Diakses 14 April 2023 dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/23012500002/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-21-6-dari-24-4-.html>
- Stunted dan Stunting (2021). Diakses pada 11 April 2023 dari <https://www.bkkbn.go.id/berita-stunted-dan-stunting>